

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal

Akuntansi

Asti Mutiara^{1*)}, Yanti Puji Astuti²⁾

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Tegal

* Email: astimutiara8@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of local revenue, general allocation funds, special allocation funds, and revenue sharing funds on capital expenditure in the District / City Governments in Central Java in 2015 - 2019. The population used in this study is to use the Regional Government APBD Report Regencies / Cities in Central Java in 2015-2019. The sample used in this study is to use the Saturation Sampling Technique which consists of 29 Regencies and 6 Cities. The data used in the form of secondary data on district / city APBD budget reports in Central Java. This research uses multiple linear regression analysis method with SPSS 23 program. The results showed that the original regional income, general allocation funds, special allocation funds, and revenue sharing funds simultaneously affected capital expenditure with a significant value of 0,000. Regional original income has an effect on capital expenditure with a significant value of 0,000, general allocation funds have an effect on capital expenditure with a significant value of 0,000, special allocation funds have no effect on capital expenditure with a significant value of 0.46 and revenue sharing funds have an effect on capital expenditure with a significant value of 0,000 .

Keywords: Regional Original Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, Capital Expenditures.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2015 - 2019. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Laporan APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada tahun 2015-2019. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan Teknik Sampling Jenuh (*Saturation Sampling*) yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota. Data yang digunakan berupa data sekunder laporan anggaran APBD kabupaten/kota di Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan program SPSS 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal dengan nilai signifikan 0,000. Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal dengan nilai signifikan 0,000, dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal dengan nilai signifikan 0,000, dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal dengan nilai signifikan 0,46 dan dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja modal dengan nilai signifikan 0,000.

Kata kunci: Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Belanja Modal

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan mengenai tentang sistem tata kelola pemerintahan di Negara Indonesia dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan telah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Pemerintah Indonesia telah berhasil melewati berbagai serangkaian yang terjadi pada proses reformasi sektor publik, khususnya yaitu mengenai tentang keuangan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan salah satu tanda dimulainya tonggak sejarah reformasi di Indonesia yakni pada awal tahun 2001 (Kusnandar & Siswantoro, 2012).

Otonomi daerah adalah salah satu bentuk desentralisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Otonomi daerah secara resmi diberlakukan pada tahun 2001 menjelaskan konsentrasi daerah otonom berada di kota atau kabupaten dan bukan di provinsi. Tujuan dari otonomi daerah menurut Undang-undang No. 22 tahun 1999 adalah lebih mengarah pada pedoman demokrasi, fungsi masyarakat, kebebasan berwewenang yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, serta menunjukan potensi dan keanekaragaman daerah (Nadir, 2013).

Berdasarkan latar belakang dan fenomena, maka dalam penelitian ini mencoba mengangkat judul dengan mereplikasi dari penelitian Meianto, Edy & Wenny dan Cherrya Dhia, (2013) dan Prastiwi, Ayu, Nurlaela & dan Chomsatu, (2016) Perbedaan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada variabel yang ditambahkan serta pada obyek dan tahun penelitian. Namun demikian dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada kabupaten/kota diwilayah Jawa Tengah.

TINJAUAN PUSTAKA

Stewardship Theory

Teori *Stewardship* menggambarkan sebuah situasi dimana pengelolaan didalam pemerintah lebih mementingkan tujuan kepentingan organisasi dan tidaklah termotivasi oleh tujuan individu. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimumkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut (Donaldson & Davis, 1991).

Otonomi Daerah

Menurut UU Nomor 32 otonomi daerah merupakan yang mencakup hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri dalam urusan pemerintahan dan kepenting-

an masyarakat setempat sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Anggaran Daerah

Mardiasmo, (2016) Anggaran daerah merupakan suatu bentuk pedoman bagi pemerintah, baik pemerintah pusat atau daerah yang berisi tentang suatu rencana pendapatan, belanja, transfer serta pembiayaan dalam periode waktu dan dinyatakan dalam bentuk rupiah.

Belanja Modal

Menurut PP No. 24 Tahun 2005 bahwa belanja modal mencakup tentang mengakuisisi tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset berwujud. Belanja modal di artikan sebagai suatu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang banyak memberikan manfaat lebih pada satu periode akuntansi.

Pajak Daerah

Mardiasmo, (2016:14) menerangkan pajak daerah adalah iuran atau pungutan wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang diberikan kepada daerah dengan tanpa imbalan langsung yang diterima berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku yang tujuannya untuk membangun daerah demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dana Alokasi Umum

Rachim,(2015:19) Mengatakan Dana Alokasi Umum merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai upaya pemerataan serta keadilan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Artinya bahwa, dana alokasi umum tersebut yang diberikan secara ketentuan yang berlaku oleh pemerintah pusat untuk digunakan dalam rangka pemerataan daerah sekaligus diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik sesuai kebutuhan masyarakat.

Dana Alokasi Khusus

Rachim,(2015:19) Menyatakan Dana Alokasi Khusus dijelaskan sebagai dana yang berasal dari pendapatan APBN yang kemudian diperuntukan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu berjalanya kegiatan khusus yang dalam hal ini merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana Bagi Hasil

Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 menjelaskan tentang dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan bantuan anggaran dari pendapatan APBN untuk memenuhi kebutuhan di suatu daerah masing-masing yang bertujuan agar terciptanya pelaksanaan desentralisasi.

Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Susanti & Fahlevi, (2016) yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Wilayah Aceh). Hasil penelitian bahwa PAD, DAU, dan DBH secara bersama-sama berpengaruh terhadap BM dan PAD, DAU, dan DBH secara parsial berpengaruh positif terhadap BM.

Penelitian oleh Meianto, Edy & Wenny dan Cherrya Dhia, (2013) yang berjudul Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kab/Kota Di SumSel. Hasil penelitian bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap BM, DAK tidak berpengaruh terhadap BM, PAD dan luas wilayah berpengaruh positif terhadap BM dan Secara simultan DAU, DAK dan PAD berpengaruh positif terhadap BM.

Penelitian oleh Prastiwi, Ayu, Nurlaela & dan Chomsatu, (2016) yang berjudul Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Pegawai Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Surakarta. Hasil penelitian bahwa Belanja Pegawai berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal. Sementara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dana

Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Penelitian oleh Adyatma & Oktavian, (2015) yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi.

Hasil penelitian bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang positif terhadap Belanja Modal. Arah koefisien regresi bertanda positif, berarti bahwa peningkatan Dana Alokasi Umum akan meningkatkan Belanja Modal. Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Pertumbuhan Ekonomi tidak memoderasi hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal. Pertumbuhan Ekonomi tidak memoderasi hubungan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal.

Penelitian oleh Novianto & Hanafiah, (2015) yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Tingkat Keefektifitas Keuangan Daerah

Tahun Sebelumnya secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal. Sedangkan Kemandirian Keuangan Daerah Tahun sebelumnya tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Penelitian oleh Syukri & Hinaya, (2019) yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi khusus terhadap Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota Sulawesi Selatan. Hasil penelitian bahwa pertumbuhan ekonomi (X1), pendapatan asli daerah (X2), dana alokasi umum (X3) dan dana alokasi khusus (X4) berpengaruh secara terhadap anggaran belanja modal (Y). Sedangkan, pengujian model secara parsial, hanya variabel PAD (X2) yang berpengaruh secara signifikan terhadap anggaran belanja modal (Y). Sedangkan, pertumbuhan ekonomi (X1), dana alokasi umum (X3) dan dana alokasi khusus (X4) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemajuan daerah (Y).

HIPOTESIS

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal

Terdapat keterkaitan yang sangat erat antara PAD dengan alokasi belanja modal. PAD berperan secara signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan

program-program pembangunan. Dalam hal ini, pengeluaran pemerintah daerah disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan pemerintah daerah (Sulistiyowati, 2011).

H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal

Pemerintah pusat memberikan dana berupa dana alokasi umum kepada Pemerintah daerah yang kemudian dialokasikan sebagai bentuk pemerataan serta keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemberian dana alokasi umum, sangat membantu pemerintah sebagai salah satu sumber pendapatan dana transfer dalam rangka memenuhi kegiatan penyelenggaraan. Dana alokasi umum, juga diharapkan dapat mempengaruhi semua kebutuhan belanja, termasuk belanja modal. Belanja modal pada dasarnya bertujuan untuk menambah asset bagi pemerintah daerah serta meningkatkan taraf pelayanan kepada publik (Abdullah & Rona, 2014).

H2: Dana Alokasi Umum berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus dengan Belanja Modal

Dana alokasi khusus diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana

dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang (Sulistyo-wati, 2011). Dengan diarahkannya peman-faatan dana alokasi khusus untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal.

H3: Dana Alokasi Khusus berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal

Pengaruh Dana Bagi Hasil dengan Belanja Modal

DBH merupakan termasuk dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat untuk daerah. jika penerimaan DBH semakin besar tentu akan mampu meningkatkan APBD. DBH juga merupa-kan penunjang pemerintah daerah untuk memenuhi sarana dan prasarana publik serta infrastruktur daerah menggunakan belanja modal. Hal ini dapat disimpulkan jika belanja modal naik maka Dana Bagi Hasil juga naik (Cahyaning, 2018).

H4: Dana Bagi Hasil berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif sekunder. Populasi peneli-tian ini adalah seluruh laporan keuangan dari 35 Kabupaten/Kota diwilayah Jawa Tengah. Sampel pada penelitian ini meng-gunakan sampel jenuh. Metode pengum-pulan data dengan mengambil data sekun-

der Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019. Analisi Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan data sekunder yang kemudian dari data tersebut diolah menggunakan bantuan dari program SPSS (*Statistical Package For the Social Science*) versi 23

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil data yang dikum-pulkan dengan metode pengumpulan data peroleh deskripsi data tentang variabel penelitian seperti pada tabel berikut:

Deskripsi Statistik

Tabel 1
Deskripsi Statistik Variabel Penelitian Tahun 2015 - 2019
(Dalam Jutaan Rupiah)
Descriptive Statistics

	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviasi on	Variance
Belanja Modal	175	97723	1611808	356754	197242	3890472123 6825000
Pendapata n Asli	175	105918	2159409	303858	241018	5808983148 4775300
Daerah Dana	175	400176	1525152	963259	252132	6357062568 6529800
Alokasi Umum	175	0	518848	236730	146315	2140822115 5038600
Dana Alokasi Khusus	175	0	585707	64933	62046	3849772815 35094
Dana Bagi Hasil	175					
Valid N (listwise)	175					

Uji Normalitas

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		175
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000327
	Std. Deviation	93241727888.41292
Most Extreme Differences	Absolute	.048
	Positive	.048
	Negative	-.045
Test Statistic		.048
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Berdasarkan hasil uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, diperoleh nilai signifikansi (*Asymp. Sig 2-tailed*) 0,200 atau 20%. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,025 atau 2,5% ($0,200 > 0,025$) , maka data residual tersebut terdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

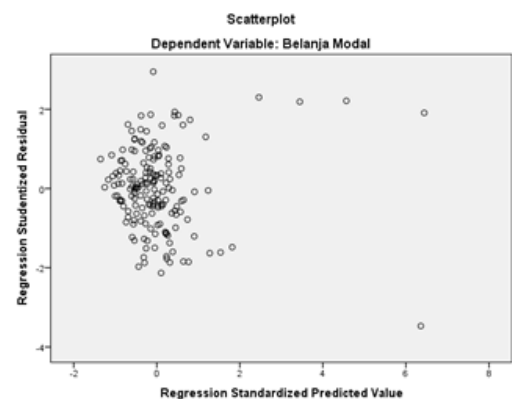
Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a		
Model	Collinearity	Statistics
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pendapatan Asli Daerah	.592	1.691
Dana Alokasi Umum	.647	1.545
Dana Alokasi Khusus	.691	1.447
Dana Bagi Hasil	.646	1.549

Berdasarkan tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa angka Tolerance dari masing-masing variabel independen memiliki angka $> 0,10$. Pendapatan asli daerah (X_1) memiliki nilai *tolerance* 0,592 ($0,592 > 0,10$) , dana alokasi umum (X_2) memiliki nilai *tolerance* 0,647 ($0,647 > 0,10$) , dana alokasi khusus (X_3) memiliki nilai *tolerance* 0,691 ($0,691 > 0,10$), sementara dana bagi hasil (X_4) memiliki nilai *tolerance* 0,646 ($0,646 > 0,10$). Uji multikolinearitas juga dapat dilihat bahwa dari semua variabel independen memiliki angka $VIF < 10$.

Pendapatan asli daerah (X_1) memiliki nilai *VIF* 1,691 ($1,691 < 10$), dana alokasi umum (X_2) memiliki nilai *VIF* 1,545 ($1,545 < 10$) , dana alokasi khusus (X_3) memiliki nilai *VIF* 1,447 ($1,447 < 10$), sementara dana bagi hasil (X_4) memiliki nilai *VIF* 1,549 ($1,549 < 10$). Berdasarkan data tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas atau seharusnya tidak terjadi regresi diantara variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil gambar *scatterplot* dengan jelas menunjukkan bahwa dalam suatu grafik tidak terdapat pola yang jelas serta titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu y. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya asumsi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	K	N	DI	Du	Durbin-Watson
1	4	175	1.7062	1.7996	1.978

Berdasarkan hasil uji autokorelasi diatas, pada nilai hitung Durbin Watson sebesar 1,978. Nilai tersebut, akan dibandingkan dengan tabel DW, dengan jumlah sampel penelitian (n) sebanyak 175, serta jumlah variabel independen (k) sebanyak 4. Dari tabel DW, dapat diketahui bahwa $dl = 1.7062$ dan $du = 1.7996$. Maka dapat disimpulkan berdasarkan pengambilan keputusan autokorelasi bahwa $du < d < 4-du$ ($1.7996 < 1.978 < 2.2004$) yang berarti tidak ada masalah autokorelasi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 6
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-7125532.235092	2868203.1693748		-.248	.804
Pendapatan Asli Daerah	.532	.039	.650	13.795	.000
Dana Alokasi Umum	.144	.035	.184	4.087	.000
Dana Alokasi Khusus	.118	.059	.088	2.006	.046
Dana Bagi Hasil	.546	.143	.172	3.803	.000

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = -7.125.532.235,092 + 0,532 X_1 +$$

$$0,144 X_2 + 0,118 X_3 + 0,546 X_4 + e$$

Persamaan regresi tersebut dapat diartikan sebagai :

- Nilai konstantan (a) adalah sebesar Rp - 7.125.532.235,092, artinya jika semua variabel independen dianggap konstan atau nol (0), maka didapatkan rata-rata belanja modal sebesar Rp - 7.125.532.235,092.
- Nilai koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah (b_1) bernilai positif yaitu 0,532, yang memiliki arti bahwa pendapatan Asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu Rupiah (Rp) proporsi pendapatan Asli daerah akan mengakibatkan kenaikan proporsi belanja modal sebesar Rp 0,532.
- Nilai koefisien regresi variabel Dana Alokasi Umum (b_2) bernilai Positif yaitu 0,144, yang memiliki arti bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu Rupiah (Rp) proporsi dana alokasi umum akan mengakibatkan kenaikan proporsi belanja modal sebesar Rp 0,144.
- Nilai koefisien regresi variabel Dana Alokasi Khusus (b_3) bernilai positif yaitu 0,118, yang memiliki arti bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif

terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu Rupiah (Rp) proporsi dana alokasi khusus akan mengakibatkan kenaikan proporsi belanja modal sebesar Rp 0,118.

- e. Nilai koefisien regresi variabel Dana Bagi Hasil (b_4) bernilai positif yaitu 0,546, yang memiliki arti bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu Rupiah (Rp) proporsi dana bagi hasil akan mengakibatkan kenaikan proporsi belanja modal sebesar Rp 0,546.

Uji Signifikansi Simultan (uji f)

Tabel 4.7
Hasil Uji Signifikansi Simultan
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	52566620465942 27000000000.00 0	4	131416551164 855680000000 0.000	147.683	.000 ^b
Residual	15127594486133 27100000000.00 0	170	889858499184 3101000000.00 0		
Total	67694214952075 55000000000.00 0	174			

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa f_{hitung} sebesar 147,683, sedangkan untuk mencari $f_{tabel} = f_{(0,025; n-m-1)}$ dimana:

m = jumlah variabel independen = 4

n = jumlah sampel = 175, $\alpha = 0,025$

dk = jumlah sampel - jumlah variabel independen - 1

Sehingga didapat $f_{tabel} = 1,36$

$f_{hitung} = 147,683 > f_{tabel} = 1,36$ serta nilai $sig = 0,000 < 0,025$

Kesimpulannya bahwa terdapat pengaruh secara simultan (bersama-sama) pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2015 -2019.

Uji Signifikansi Parsial (uji t)

Tabel 6
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7125532235092	28682031693748		-.248	.804
Pendapatan Asli Daerah	.532	.039	.650	13.795	.000
Dana Alokasi Umum	.144	.035	.184	4.087	.000
Dana Alokasi Khusus	.118	.059	.088	2.006	.046
Dana Bagi Hasil	.546	.143	.172	3.803	.000

Berdasarkan tabel tersebut, dapat kita pahami bahwa :

$t_{tabel} = t_{(\alpha/2)(n-4)} = t_{(0,025,171)} = 1.97393$

Variabel Pendapatan Asli Daerah

t_1 hitung = 13,795, t tabel = 1.97393

$t_{hitung} > t_{tabel}$, nilai Sig = 0,000 < 0,025

Maka, H_0 ditolak kesimpulannya bahwa terdapat pengaruh secara parsial antara variabel pendapatan asli daerah terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah Tahun 2015 - 2019.

Variabel Dana Alokasi Umum

t_2 hitung = 4,087, t tabel = 1.97393 $t_{2\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, nilai Sig = 0,000 < 0,025

Maka, H_0 ditolak kesimpulannya bahwa terdapat pengaruh secara parsial antara variabel dana alokasi umum terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2015 - 2019.

Variabel Dana Alokasi Khusus

t_3 hitung = 2,006, t tabel = 1.97393
 $t_{3\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$, nilai Sig = 0,046 > 0,025

Maka, H_0 diterima kesimpulannya bahwa tidak terdapat pengaruh secara parsial antara variabel dana alokasi khusus terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2015 - 2019.

Variabel Dana Bagi Hasil

t_4 hitung = 3,803, t tabel = 1.97393
 $t_{4\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, nilai Sig = 0,000 < 0,025

Maka, H_0 ditolak kesimpulannya bahwa terdapat pengaruh secara parsial antara variabel dana bagi hasil terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2015 - 2019.

Koefisien Determinasi

Tabel 4.9
Hasil Koefisien Determinasi
Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.881 ^a	.777	.771	94332311494.223

Dari hasil perhitungan pada tabel, dapat diketahui nilai *Adjusted R Square* diperoleh sebesar 0,771. Nilai tersebut mengandung arti bahwa total variasi Belanja Modal yang disebabkan oleh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil secara bersama-sama adalah 77,1% dan sisanya 22,9% berasal dari factor lain yang tidak dapat dijelaskan.

PEMNAHASAN

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal

Memiliki Nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari tarif signifikansi sebesar 0,025. Maka Hipotesis ditolak kesimpulannya bahwa terdapat pengaruh parsial antara variabel pendapatan asli daerah terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah Tahun 2015 - 2019.

Dana Alokasi Umum berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal

Memiliki Nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari tarif signifikansi sebesar 0,025. Maka Hipotesis ditolak kesimpulannya bahwa terdapat pengaruh parsial antara variabel dana alokasi umum terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2015 - 2019.

Dana Alokasi Khusus berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal

Memiliki Nilai signifikansi sebesar 0,046 lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 0,025. Maka Hipotesis diterima kesimpulannya bahwa tidak terdapat pengaruh secara parsial antara variabel dana alokasi khusus terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2015 - 2019.

Dana Bagi Hasil berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal

Memiliki Nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 0,025. Maka Hipotesis ditolak kesimpulannya bahwa terdapat pengaruh parsial antara variabel pendapatan asli daerah terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2015 - 2019.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan bab-bab sebelumnya yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2015 – 2019.

2. Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten-/Kota di Jawa Tengah tahun 2015 – 2019.
3. Dana Alokasi khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2015 – 2019.
4. Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2015 – 2019.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk menambahkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi belanja modal. Penelitian selanjutnya menambah variabel-variabel yang mempengaruhi belanja modal seperti: Luas wilayah, dana perimbangan, belanja pegawai, kinerja keuangan, pertumbuhan ekonomi, pendapatan retribusi, pendapatan pajak daerah, pendapatan regional perkapita, sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA), produk domestik regional bruto (PDRB), belanja hibah, dan rasio kemandirian keuangan daerah.

Penelitian ini hanya dilakukan pada kabupaten/kota yang ada di Wilayah Jawa

Tengah, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas subjek penelitian.

Penelitian selanjutnya dapat rentang waktu pengamatan lebih dari lima tahun minimal pengamatan selama enam tahun sehingga lebih menggambarkan kondisi yang sebenarnya serta memberikan hasil yang lebih efisien dan efektif.

Pemerintah daerah sebaiknya mengoptimalkan potensi penerimaan daerah terutama dalam bentuk PAD sehingga tidak terlalu bergantung kepada pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., & Rona, R. (2014). Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 7(1), 179–202.
- Adyatma, E., & Oktaviani, R. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 4(2), 190–205.
- Cahyaning, S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 3(1), 1–38.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64.
- Kusnandar, & Siswantoro, D. (2012). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. *SNA XV Banjarmasin*, 32, 1–20.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru*.
- Meianto, Edy, B., & Wenny dan Cherrya Dhia. (2013). *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan*. 1–13.
- Nadir, S. (2013). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa Jurnal Politik Profetik Volume 1 Nomor1 Tahun 2013. *Jurnal Politik Profetik*, 1(1), 2013.
- Novianto, R., & Hanafiah, R. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten / Kota Di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi*, 4(1), 1–22.
- Prastiwi, Ayu, Nurlaela, S., & dan Chomsatu, Y. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja

Pengawai Terhadap Belanja
Modal Pemerintah Kota
Surakarta. *Seminar Nasional
IENACO-2016*, 872–879.

Rachim, A. (2015). *Barometer Keuangan
Negara/Daerah*.

Sulistyowati, D. (2011). *Alokasi Belanja
Modal*.

Susanti, S., & Fahlevi, H. (2016).
Pengaruh Pendapatan Asli
Daerah, Dana Alokasi Umum,
dan Dana Bagi Hasil Terhadap
Belanja Modal (Studi Pada
Kabupaten/Kota di Wilayah
Aceh). *Jurnal Berkala Ilmiah
Efisiensi*, 16(03), 586–595.

Syukri, M., & Hinaya, H. (2019).
Pengaruh Pertumbuhan
Ekonomi, Pendapatan Asli
Daerah, Dana Alokasi Umum
Dan Dana Alokasi Khusus
Terhadap Anggaran Belanja
Modal Kabupaten & Kota
Provinsi Sulawesi Selatan.
*JEMMA | Journal of Economic,
Management and Accounting*,
2(2), 30.

-----, 2004. Undang –
Undang Nomor 33 tahun 2004
Tentang Perimbangan Keuangan

-----, 2005. Peraturan
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
Tentang Dana Perimbangan

-----, 2011. Peraturan
Menteri Keuangan No. 101/PMK
02/ 2011 *Tentang Klasifikasi
Anggaran Belanja Modal*